



20
24



Kegiatan Koordinasi Pengawasan Hari
Besan Keagamaan Nasional (HBKN) dan
Reviu Kinerja Program Tertib Ukur
Triwulan 1 Tahun 2024

Tahun 2024

LAPORAN PERJALANAN DINAS
NOMOR TU.04/41/PKTN.4.4/ST/04/2024

- Kepada : Kuasa Pengguna Anggaran
- Dari : Oki Sri Swastini
- Hal : Laporan Koordinasi Pengawasan Hari Besar Keagamaan Nasional dan Reviu Kinerja Program Tertib Ukur Triwulan I Tahun 2024
- Lampiran : Dokumentasi Kegiatan dan Surat Tugas
- Tanggal : 16 s.d.19 April 2024
- Menimbang : bahwa perlunya melakukan reviu kinerja periode Triwulan I tahun 2024 dan melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan hari besar keagamaan nasional tahun 2024.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. Undangan Direktur Metrologi No. MR.00.01/751.2/PKTN.4/UND/04/2024 tanggal 1 April 2024 Hal Undangan Reviu Kinerja Program Tertib Ukur Triwulan I Tahun 2024
4. Surat Tugas Nomor TU.04/41/PKTN.4.4/ST/04/2024 tanggal 5 April 2024
- Isi Laporan : 1. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Metrologi beserta pejabat Eselon III, dan IV di lingkungan Direktorat Metrologi.
2. Beberapa poin penting terkait dengan koordinasi kegiatan Pengawasan Hari Besar Keagamaan Nasional yaitu:
a. Pengawasan Hari Besar Keagamaan Nasional dilaksanakan di wilayah Regional IV dengan melibatkan UML terkait, adapun objek pengawasan adalah SPBU;
b. Hal yang patut menjadi perhatian adalah adanya kecurangan yang dilakukan oleh SPBU yaitu:
- Kecurangan secara mekanik : modifikasi badan ukur, melubangi alat justir elektronik, memutus segel;
- Kecurangan secara elektronik : modifikasi pulser, hubung singkat justir elektronik, perangkat elektronik tambahan
c. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengawasan Pompa Ukur BBM yaitu:
- (*Wiring*) Jalur kabel pulser dari badan ukur ke badan hitung;

- Kondisi Cap Tanda Tera pada alat justir dan badan ukur;
 - Ruang kosong yang berada dalam PUBBM;
 - Rangkaian elektronik di badan hitung (IC).
- d. Beberapa hal yang perlu disosialisasikan kepada pelaku usaha:
- Lakukan pengujian harian sebelum SPBU beroperasi;
 - *Maintenance* secara berkala;
 - Pemutusan Cap Tanda Tera untuk menghubungi pihak Metrologi setempat;
 - Pada saat dilakukan *maintenance* agar disaksikan oleh pihak Metrologi setempat;
 - Cek apakah ada alat tambahan di Pompa Ukur (Konsultasi dengan Metrologi setempat atau Teknisi resmi).
3. Beberapa Poin penting terkait dengan reviu Triwulan I Direktorat Metrologi:
- a. Indeks Tertib Ukur Direktorat Metrologi Triwulan I adalah 70,54%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 43,66%;
 - b. Pengawasan UTTP di Direktorat Metrologi Triwulan I sebanyak 8282 Unit UTTP yang dilaksanakan di 30 Kabupaten/Kota dimana sebanyak 82,94% sesuai ketentuan dan 17,06% tidak sesuai ketentuan;
 - c. Pengawasan BDKT di Direktorat Metrologi Triwulan I sebanyak 206 Produk UTTP yang dilaksanakan di 13 Kabupaten/Kota dimana 43,69% sesuai ketentuan dan 56,31% tidak sesuai ketentuan;
 - d. Jumlah alat standar milik Unit Metrologi Legal yang diverifikasi triwulan I di Direktorat Metrologi dan BSML adalah sebanyak 5882 Alat Standar;
 - e. Rencana aksi tertib ukur Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:
 - Meningkatkan kegiatan edukasi masyarakat di bidang metrologi legal dalam rangkaian acara “World Metrology Day” tahun 2024 yang merupakan kolaborasi kegiatan antara Direktorat Metrologi, Akademi Metrologi dan Instrumentasi, Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN);
 - Meningkatkan sinergi dengan BPHN dalam rangka finalisasi dan penyelarasan Naskah Akademik RUUML serta menghidupkan kembali biaya retribusi kegiatan pelayanan Metrologi Legal di daerah;
 - Kolaborasi dengan kementerian/lembaga dalam optimalisasi kegiatan dan inovasi di bidang metrologi legal, seperti dengan perguruan tinggi (Universitas Telkom) dan PERURI untuk pengembangan tanda tera digital;
 - Peningkatan kerja sama pengembangan kapasitas SDM Metrologi Legal dengan negara-negara mitra, seperti Korea Selatan, Jerman, Taiwan, New Zealand dan kerja sama regional APLMF dan AANZ;
 - Optimalisasi Pendirian dan Pembinaan Unit Metrologi legal kabupaten/kota, serta membangun sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam membangun komitmen pemerintah daerah agar kegiatan Metrologi Legal dapat terselenggara secara berkelanjutan.
4. Beberapa poin pembahasan terkait dengan Pembahasan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Lega:

- a. Penyusunan RUU Metrologi Legal telah dimulai sejak tahun 2011 dan di tahun 2023 telah ditandatangani Draft RUU Metrologi Legal oleh Tim Panitia Antar Kementerian/Lembaga;
- b. Di tahun 2024 dilaksanakan penyelarasan Naskah Akademik dan Harmonisasi RUU Metrologi Legal;
- c. Draf RUU Metrologi Legal telah direview oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan hasil review sebagai berikut:
 - Dalam rangka penyelenggaraan Metrologi Legal yang sinergis, harmonis, dan terintegrasi, Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Metrologi menyusun strategi nasional Metrologi Legal yang diimplementasikan oleh Kementerian Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu mempertimbangkan peningkatan struktur kelembagaan Direktorat Metrologi agar mampu melaksanakan tugas tersebut;
 - Akan diatur kembali terkait pengenaan biaya pelayanan tera dan tera ulang;
 - Akan diatur terkait peningkatan kepatuhan hukum kepada pelaku usaha atau badan usaha dimana hal ini akan dirumuskan kembali dalam Pasal 31F yang nantinya akan terdapat audit teknis dan audit kepatuhan hukum.

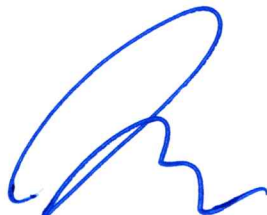
;Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja output dan anggaran pada triwulan I telah sesuai dengan target, diharapkan pada triwulan II dapat terus ditingkatkan, selain itu diperlukan peran aktif dan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak dalam meningkatkan indeks tertib ukur.
2. Terkait dengan Pengawasan Hari Besar Keagamaan, diperlukan kerjasama yang baik baik di antara Direktorat Metrologi termasuk BSML dengan UML daerah terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, termasuk didalamnya kegiatan sosialisasi tertib ukur dan pengawasan UTTP serta BDKT.

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Gowa, 22 April 2024
Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

1. *Okie Sri Swastini*

()

DOKUMENTASI KEGIATAN





SURAT TUGAS

NOMOR TU.04/41/PKTN.4.4/ST/04/2024

Dalam rangka melaksanakan tugas Kegiatan Koordinasi Pengawasan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Reviu Kinerja Program Tertib Ukur Triwulan 1 Tahun 2024 sesuai undangan Direktur Metrologi nomor MR.00.01/751.2/PKTN.4/UND/04/2024 tanggal 1 April 2024, kami menugasi:

1. Nama / NIP : Oki Sri Swastini / 197506251994032001
Pangkat / Gol : Pembina / IVa
Jabatan : Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV

di Kota Bandung, Jawa Barat selama 4 hari, mulai tanggal 16 April 2024 sampai dengan 19 April 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKTN (Operasional Perkantoran dan Pimpinan: 090.09.WA.3977.EBA.994.002.B.524111) dengan target kinerja atau hasil yang akan dicapai adalah Kegiatan Koordinasi Pengawasan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Reviu Kinerja Program Tertib Ukur Triwulan 1 Tahun 2024.

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah dilaksanakan pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Gowa
pada tanggal, 5 April 2024
a.n. Direktur Metrologi

Kepala Balai Standardisasi Metrologi
Legal Regional IV



Ok Sri Swastni

NIP:197506251994032001